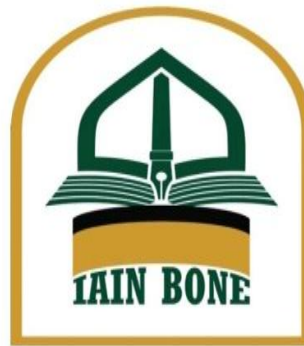


**ANALISIS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
(BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT  
(Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA EKONOMI DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN BONE**

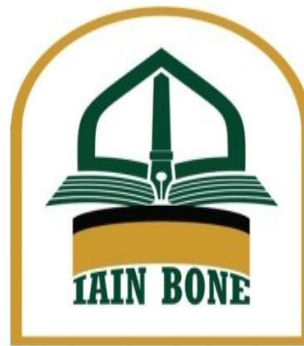
Oleh:

**ADRIANA**

NIM. 01163001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

**ANALISIS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
(BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT  
(Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA EKONOMI DALAM BIDANG EKONOMI SYARIAH  
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN BONE**

Oleh:

**ADRIANA**

NIM. 01163001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Adriana

Nim : 01163001

Jenjang : Sarjana (S1)


Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

menyatakan bahwa skripsi benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, sebagian atau seluruhnya maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku demikian pula skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 27 Agustus 2020

Penyusun



ADRIANA  
NIM: 01163001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi pada masyarakat Desa jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)*” yang disusun oleh Saudari **ADRIANA**, NIM: 01.16.3001, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Watampone, 12 Oktober 2020 M  
25 Safar 1442 H

### DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI	(.....)
Sekretaris	: Ismail Keri, S.Ag., MH.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Ruslan, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Rina Novianty, S.Pd., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Ismail Keri, S.Ag., MH.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kamiruddin, S.E.Sy., M.E	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Bone

  
Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI  
NIP. 19681220 200312 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi:

Nama : Adriana

NIM : 01163001

Prodi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

Yang berjudul:

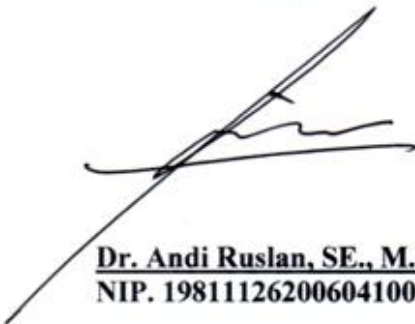
***“Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab.Bone)”***,

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 27 Agustus 2020

**Pembimbing I**



**Dr. Andi Ruslan, SE., M.Si.**  
**NIP. 198111262006041001**

**Pembimbing II**



**Rina Novianty, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 198711142015032009**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)”**

**ADRIANA**

**01163001**

Skripsi ini membahas tentang Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini tentang Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdapat permasalahan pada prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan persyaratan administrasi masih terbatas. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder.

*Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kesejahteraan Masyarakat*

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Sebagai pencipta alam semesta yang memberikan rahmat dan anugerah keindahan hidup dengan ajaran-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas anugerah yang tiada terkira berupa kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuangkan sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul “Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone)”

Segala hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Untuk itu suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih tulus dan ikhlas, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Bakri dan Ibunda Suarni yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun spiritual dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu melindungi serta melimpahkan Rezeki kepada kedua orang tua saya. Amin Ya Allah.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Syaparuddin, S.Ag., MS.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta staff yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Dr. Abdul Rahim, S.Ag., M.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Dr. Andi Ruslan, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Rina Novianty, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta membagikan ilmunya dalam memberikan pengarahan dan bimbingan pada penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Sungguh berharga ilmu dan pengalaman yang beliau berikan selama proses bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Sungguh rasa terima kasih yang sebesar besarnya saya berikan kepada kedua pembimbing saya, semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat bagi orang lain.
6. Bapak Ardi, S.Sos. selaku kepala Desa Jaling beserta Jajarannya atas izin yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan penelitian di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si., selaku kepala Perpustakaan beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
8. Para dosen dan staf FEBI yang telah membantu dalam proses administrasi.



9. Terima kasih kepada sahabat saya C.C yang selalu memberikan dorongan, saling memotivasi antara satu sama lain, dan selalu sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memperoleh Gelar S.E.
10. Teman-teman EKISSATU16 yang terus memberikan solidaritas, memberikan semangat satu sama lain mulai dari awal masuk kuliah hingga menyelesaikan studi strata satu.
11. Terima kasih juga kepada senior saya Muh.Assidiq, S.H. yang telah mendorong dari awal untuk cepat dalam menyelesaikan studi dan memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Hanya kepada Allah jualah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Awangpone, 27 Agustus 2020

Penulis,



**ADRIANA**  
**01163001**

## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL, i**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI, ii**

**HALAMAN PENGESAHAN, iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING, iv**

**ABSTRAK, v**

**KATA PENGANTAR, vi**

**DAFTAR ISI, ix**

**DAFTAR TABEL, xi**

**DAFTAR GAMBAR, xii**

**DAFTAR LAMPIRAN, xiii**

**DAFTAR TRANSLITERASI, xiv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 5
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian, 5
- D. Ruang Lingkup Penelitian, 6
- E. Sistematika Pembahasan, 6

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

- A. Kajian Penelitian Tedahulu, 8
- B. Kajian Teori, 12
- C. Kerangka Pikir, 33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian, 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian, 35

C. Data dan Sumber Data, 35

D. Subjek dan Objek Penelitian, 37

E. Teknik Pengmpulan Data, 37

F. Teknik Analisis Data, 39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian, 42

B. Pembahasan, 54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan, 57

B. Saran , 57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu, 8
Tabel 3.1	Pedoman Wawancara, 35
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Desa Jaling, 46
Tabel 4.2	Jumlah Penerima BPNT, 50

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pikir, 33
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jaling, 47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian, 61
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, 62
Lampiran 3	Pedoman Wawancara, 63
Lampiran 4	Hasil Wawancara, 64
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian, 66

## DAFTAR TRASLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hah	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa



Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِيّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanuwa *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِيمُ : *nu‘īma*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينُنَا *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program Pemerintah yang berorientasi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 dan telah dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa, dan 3 kota di wilayah Timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia yaitu berjumlah 1,286.194 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan senilai Rp 1,7 triliun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ayuni Zalita Pepi, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung 2019), h. 2.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.<sup>2</sup>

Tujuan program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) salah satunya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, serta PERMENSOS No.25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Eletronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (PHK).<sup>3</sup>

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan PERPRES RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT).

---

<sup>2</sup>Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h.48.

<sup>3</sup>Anisa Rahma Dini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung” (Skrip, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2019), h. 3.



Presiden sangat mengapresiasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta keluarga penerimamanfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone merupakan suatu Desa yang jumlah penduduknya sebanyak 2.736 jiwa. Peneliti melakukan wawancara dengan petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa Desa ini sudah termasuk menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone. Untuk saat ini yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sebanyak 158 KK yang masyarakatnya tergolong pada tingkat ekonomi rendah.<sup>5</sup>

Masyarakat, Lurah, Camat, Bupati, maupun Gubernur Tidak dapat mengganti data KPM yang ada, karena sudah merupakan ketentuan dari pemerintahan pusat. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Dinas Sosial Kabupaten Bone perlu melakukan usulan pendataan ulang mengenai pemanfaatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sesuai, di bantu oleh RT, Lurah/Kepala Desa ataupun aparat Desa agar realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kedepannya benar-benar tepat sasaran. Maka dari itu perlu

---

<sup>4</sup>Anisa Rahma Dini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung” (Skrif, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 3.

<sup>5</sup>Sahlia, petugas BPNT, Desa Jaling, Kec. Awangpone, Kab. Bone, Hasil wawancara oleh Penulis di Dusun Abbekkae, 20 Mei 2020.

dilakukan Basis Data Terpadu yang baru agar dapat mengakomodir KeluargaPenerima Manfaat (KPM) yang tepat sasaran bukan yang didasari oleh pendekatan ataupun ikatan saudara. Menurut pengamatan, dengan adanya Bantuan Pangan Langsung Non Tunai (BPNT) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa Beras, telur, maupun uang maka masyarakat tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektivitas dan efesiensi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam keadaan fisik maupun ekonomi dan tepat dalam sasaran penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahda Sulukin Nisa pada tahun 2018 mengenai implementasi bantuan pangan non-tunai (BPNT) melalui E-Warong menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu<sup>6</sup>, sedangkan realita yang dilihat oleh penulis dilapangan bahwayang terjadi pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone masih terdapat beberapa kendala dibuktikan dengan Faktanya yang terjadi di lapangan masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang benar-benar berhak tetapi tidak menerima. Sebaliknya terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berhak tetapi kenyataannya ia menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terjadi karena data Keluarga

---

<sup>6</sup>Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h. ii.

Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih mengacu pada rujukan pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari pemutakhiran Basis Data Terpadu. Maka Sebaiknya melakukan Basis Data Terpadu yang baru mengenai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di salurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.

Melihat permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian untuk mengetahui “Analisis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa Jaling Kec.Awangpone Kab.Bone)”.

## **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone?
2. Bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone?

## **C. *Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone.

- b. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan mengenai Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- b. Kegunaan Praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi dan panduan kepada orang-orang yang membacanya, dan dapat menjadi panduan untuk memahami tentang kesejahteraan masyarakat di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone .

### ***D. Ruang Lingkup Penelitian***

Yang menjadi Ruang Lingkup Pada penelitian ini yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone.

### ***E. Sistematika Pembahasan***

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian pustaka berisi tetang kajian penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka Pikir.

BAB III : Metode penelitian berisi Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : Hasil penelitian berisi tentang jawaban dari pertanyaan/masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan sebelumnya diuraikan, di bahas sesuai dengan kajian pustaka yang telah ditentukan pada bab II dan dianalisis dengan menggunakan teknik/alat analisis yang telah ditentukan pada bab III.

BAB V : Bagian penutup, berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### **A. *Kajian Penelitian Terdahulu***

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu yang dilakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan salah satu kewajiban bagi peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan hasil orisinilitas penelitian dan plagiarisme.

Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

---

**NO Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

---

1	Nama	Ika Surya K., dan Weni Rosdiana
	Institusi	Universits Negeri Surabaya
	Judul	Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warong.
	Tahun	2018

Lokasi	Kelurahan Sidosermo Kecamatan Woncolo Kota Surabaya.
Pokok Masalah	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warong.
Jenis Penelitian	Deskriptif kuantitatif
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. <sup>7</sup>
Perbedaan	Pada penelitian ini yang menjadi fokus Penelitian yaitu BPNT melalui E-Warong, menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif dan lokasi penelitian yang berbeda.

---

2	Nama	Ahda Sulukin Nisa
	Institusi	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	Judul	Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.
	Tahun	2019
	Lokasi	Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan

---

<sup>7</sup>Anisa Rahma Dini, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung” (Skrip, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2019), h. 71.

Pokok Masalah	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Jenis Penelitian	Deskriptif kuantitatif
Hasil Penelitian	<p>Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya. Karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan ini hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.<sup>8</sup></p>
Perbedaan	<p>Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu BPNT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu indikator yang indikator tingkat pencapaian dan Lokasi Penelitian.</p>
<hr/>	
3	<p>Nama Ayuni Zalita Pepi</p> <p>Institusi Universitas Lampung</p> <p>Judul Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektroni E-Warong.</p> <p>Tahun 2019</p> <p>Lokasi Kelurahan Rajabasa Jaya dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung</p>

---

<sup>8</sup>Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h. 92.



Pokok Masalah	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik E-Warong.
Jenis Penelitian	Pelitian Kualitatif
Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian ini ialah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum dapat memenuhi jumlah sebagian kebutuhan pokok KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setelah di hitung konsumsi per hari dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tepat sasaran. Kurangnya perencanaan dan pengawasan menyebabkan permasalahan pemanfaatan seperti saldo terlambat masuk dan kartu hilang. Alokasi sumber daya dinilai masih kurang belum adanya pelatihan maupun pembekalan kepa da pendamping, mekanisme pelaksanaan belum diawasi dengan baik. Untuk variabel lingkungan cukup dari kondisi ekonomi sosial masyarakat sudah mendukung namun kualitas beras yang diberikan masih kurang baik.<sup>9</sup></p>
Perbedaan	<p>Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Implementasi BPNT melalui E-Warong dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan indikator dan lokasi pun yang berbeda.</p>

---

<sup>9</sup>Ayuni Zalita Pepi, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung 2019), h. 1.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih mengarah kepada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep dasar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

#### **a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/ E-Warong.<sup>10</sup>

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk keluarga miskin.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Benny Rachman, dkk. “Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 16. No. 1, Juni 2018, h. 2.

<sup>11</sup>Silvia Maulidina, “Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung, 2018), h.26.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan Pangan. Dalam proses penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Kombo, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.<sup>12</sup>

#### **b. Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

##### 1) Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai

- a) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Pangan.
- b) Memberikan nutri yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- c) Meningkatkan ketepatan sarana dan waktu penerimaan bantuan pasangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

##### 2) Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

---

<sup>12</sup> Rohana dan Mardiyanto, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang” *Demography Journal Of Sriwijaya*, Vol.6. 2, Januari 2019, h. 2.

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
- c) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan SNKI.
- d) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.<sup>13</sup>

**c. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Menurut Buku Pedoman pelaksanaan pangan non tunai yang disusun oleh kementerian/lembaga lintas sektor terkait, yaitu Kemenko pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Prinsip umum program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 2) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, beberapa jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan referensi.

---

<sup>13</sup>Tondhi Ramadhan, “Efektifitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Jom fisip*, vol. 5, Edisi II Juli-Desember 2018, h. 10.

- 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>14</sup>

**d. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu antara lain:

- 1) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di salurkan di lokasi dengan kriteria:
  - a) Tersambung dengan jaringan internet.
  - b) Terdapat Elektronik Warong.
  - c) E-Warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipersyaratkan sebagai:
  - a) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercantum dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
  - b) Yang tergolong peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial, diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan.

Kriteria miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu

---

<sup>14</sup>Anisa Rahma Dini, "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 48.

antara lain:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> perorang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,00 per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,00 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak,

kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>6</sup> Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin.<sup>15</sup>

#### **e. Sarana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana berupa fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk kelangsungan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah KKS/Kartu Kombo, Mesin pembaca Kartu Kombo yang berupa *EDC/Smartphone, Mobile, Postdepice/Tablet/NFC Reader/Biometric Reader*. Penggunaan mesin pembaca kartu kombo dapat dipilih agen e-warong, sehingga agen e-warong dapat beradaptasi sesuai dengan kemampuannya menggunakan mesin pembaca kartu.

Sarana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lainnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang disebut juga dengan kartu kombo. Kartu Kombo merupakan alat pembayaran elektronik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial.<sup>16</sup>

#### **f. Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh

---

<sup>15</sup>Nur Halimah, "Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), h. 27.

<sup>16</sup>Rohana dan Mardiyanto, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang" *Demography Journal Of Sriwijaya*, vol.6. 2, Januari 2019, h. 9.

terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannya rendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Rumah dengan kondisi tidak layak huni.<sup>17</sup>

#### **g. Dampak yang ditimbulkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam merubah pola pengeluaran rumah tangga yakni dengan peningkatan konsumsi pangannya. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga yang berhak menerima bantuan

---

<sup>17</sup>Rohana dan Mardiyanto, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang" *Demography Journal Of Sriwijaya*, vol.6. 2, Januari 2019, h. 6.



pangan non tunai (BPNT). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi dengan adanya Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) ini banyak masyarakat yang merasa iri atau timbul rasa kecemburuan karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.<sup>18</sup>

## **2. Konsep Dasar Kesejahteraan Masyarakat**

### **a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera”. Sejahtera itu mengandung pengertian dari bahasa sansekreta “*Cantera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang, baik lahir maupun batin.

Sedangkan Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan, Sehingga semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi.

---

<sup>18</sup>Silvia Maulidina, “Analisis korelasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Pasundan Bandung, 2018), h. 6.

Menurut Humon (2016) menyatakan bahwa Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan tercapainya kebutuhan dasar yang dapat dilihat dari rumah layak huni, tercapainya kebutuhan dasar baik yang dilihat dari kebutuhan sandan maupun pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang relatif murah dan berkualitas sehingga dapat tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>19</sup>

Menurut Prabawa (1988) Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>20</sup>

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2014) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhisesuai dengan tingkat hidup.

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera dalam kehidupan sosial baik dilihat dari material maupun spiritual dalam hal keamanan, keselamatan, dan ketenteraman hidup baik dalam hal tata kehidupan sosial, material, maupun spiritual dalam melakukan

---

<sup>19</sup>Riski Ulfa Nazilla, "Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Genceu Komplek Kecamatan Banda Raya, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018), h. 20

<sup>20</sup>Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara" *Jurnal Geografi*, Vol 9 No.1, 2017, h. 57.

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Rambe (2004).<sup>21</sup>

Seperti firman Allah SWT dalam QS Hud/11: 6 bahwa Allah swt sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam QS Hud/11: 6 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahannya: *Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).*<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah swt telah menjamin rezeki semua makhluk yang berjalan diatas permukaan bumi, sebagai bentuk karunia darinya, dan dia mengetahui tempat tinggalnya saat hidup dan setelah matinya, an mengetahui tempat dimana ia akan mati. Semua itu sudah tertulis disatu kitab disisi Allah yang sudah menerangkan itu.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi atau keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandan,

---

<sup>21</sup>Ayu Triana, “Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi organik dan anorganik” (Skripsi, fakultas pertanian, Universitas lampung, Bandar Lampung, 2019), h. 32.

<sup>22</sup>Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h.18.

pangan dan papan serta dapat hidup layak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mendefenisikan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keadaan Yang sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan dari penyakit-penyakit sosial tertentu saja.<sup>23</sup>

Kesejahteraan masyarakat menurut Sen Pressmen adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan memaksimumkan apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya. Dalam UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, yang sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

UU No. 11 Tahun 2009 menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu bentuk kondisi terpenuhnya segala bentuk kebutuhan masyarakat baik material, maupun spiritual agar dapat terpenuhinya kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

---

<sup>23</sup>Hardiawansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makasaar, 2011), h. 4.

Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.<sup>24</sup>

Adapun Fungsi kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan sosial, fisik, dan emosional sehingga orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar di dalam masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan serta sumber daya sosial di dalam masyarakat.

---

<sup>24</sup>Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), h. 19.

#### 4. Fungsi Penunjang

Fungsi yang satu ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lainnya.

Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta distribusi pendapatan yang merata, sehingga pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun sosial dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 menyatakan bahwa Keluarga Sejahtera merupakan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi akan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya baik berupa sandang, pangan maupun papan serta sosial dan agama yang dilandasi atas perkawinan yang sah. Adapun indikator-indikator tentang tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah digunakan oleh Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu sebagai berikut:

- a) Keluarga Pra Sejahtera: Keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I atau indikator dasar keluarga.

---

<sup>25</sup>Astrid Thalia Miranda Mashanafi, "Peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow terhadap kesejahteraan masyarakat" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), h. 44-46.

- b) Keluarga Sejahtera I : Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan Keluarga Sejahtera I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis keluarga.
- (1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
  - (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan berpergian.
  - (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik.
  - (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa kesarana kesehatan.
  - (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi kesarana kontrasepsi.
  - (6) Semua anak umur 7-15 thun dalam keluarga bersekolah.
- c) Keluarga sejahtera II : Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I dan 8 (delapan) indikator sejahtera II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III atau indikator pengembangan dari keluarga.
- (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
  - (2) Minimal seminggu sekali tersebut menyediakan daging, ikan, telur sebagai lauk pauk.
  - (3) Memperoleh pakaian baru dalam setahun terakhir.
  - (4) Luas lantai tiap penghuni rumah satu 8 m<sup>2</sup>.
  - (5) Anggota keluarga sehat dalam keadaan tiga bulan terakhir, sehingga dapat menjalankan fungsi masing-masing.

- (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
  - (7) Bisa baca tulis latin bagi anggota keluarga dewasa yang berumur 10-16 tahun.
  - (8) Anak hidup dua atau lebih dan saat ini masih memakai alat kontrasepsi.
- d) Keluarga Sejahtera III : Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I , 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II dan 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator keluarga sejahtera III plus atau indikator aktualisasi dari keluarga.
- (1) Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  - (2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  - (3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  - (4) Turut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
  - (5) Keluarga melaksanakan liburan bersama minimal sekali dalam 6 bulan.
  - (6) Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi dan majalah.



e) Keluarga Sejahtera III Plus : Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan keluarga sejahtera I, 8 (delapan) indikator keluarga sejahtera II, 5 (lima) indikator keluarga sejahtera III, serta 2 (dua) indikator tahapan-tahapan keluarga sejahtera III Plus.

(1) Memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela untuk kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

(2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan atau instansi masyarakat.<sup>26</sup>

#### **b. Jenis-jenis kebutuhan menurut tingkat internalitas**

##### 1) Kebutuhan primer

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat penting akan kebutuhan manusia dalam mempertahankan hidupnya yaitu kebutuhan akan makan, minum, berpakaian. selain itu, manusia memerlukan tempat tinggal atau rumah.

##### 2) Kebutuhan sekunder

Kebutuhan sekunder, setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap. Misalnya, manusia perlu sepeda, kipa angin, meja, kursi, kulkas dan peralatan yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanannya.

##### 3) Kebutuhan tersier

---

<sup>26</sup>Deni handani, dkk, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka pemerataan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 60.

Kebutuhan tersier pada umumnya, seseorang masih merasa belum cukup meskipun dia telah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Dia masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatannya lebih tinggi. Dia masih memiliki keinginan untuk memiliki mobil, kapal serta kebutuhan mewah lainnya.<sup>27</sup>

**c. Sasaran Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT)**

Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannya rendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>27</sup>Alam, s, *Ekonomi* (Jakarta: Esis 2006).

4) Rumah dengan kondisi tidak layak huni.<sup>28</sup>

#### **d. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki tanggung jawab utama, karena pemerintah adalah pembuat sekaligus pengawas kebijakan. Ini sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945. Dan No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin.

Edi Suharto dalam bukunya “Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa jika dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal, yakni jaminan sosial maka ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, maupun kematian. Bisa dipastikan sebagian besar orang miskin berada diantara mereka yang hidup tanpa perlindungan sosial.

Perlindungan sosial merupakan elemen penting bagi strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multi dimensional yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai kebijakan publik, maka perlindungan sosial yang menunjukkan pada berbagai bentuk pelayan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi

---

<sup>28</sup> Rohana dan Mardiyanto, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang” *Demography Journal Of Sriwijaya*, vol.6. 2, Januari 2019, h. 6.

warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial, politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.<sup>29</sup>

Ada lima bentuk perlindungan sosial dari pemerintah menurut Edi Suharto, yakni pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skem mikro dan berbasis komunitas, serta perlindungan anak.

a) Pasar tenaga kerja

Pekerjaan pada dasarnya merupakan perlindungan sosial yang penting bagi setiap individu. Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan. Pekerjaan yang memberi penghasilan memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi resiko, skema pasar kerja dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan operasi pasar tenaga kerja yang efisien. Sasaran utamanya adalah populasi usia kerja baik bekerja disektor formal maupun informal.

b) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan.<sup>30</sup> Program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan

---

<sup>29</sup>Hardiawansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makasaar, 2011), h. 24.

<sup>30</sup>Hardiawansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makasaar, 2011), h. 25.

kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua, dan kematian. Program ini mencakup:

- (1) Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun situasional.
- (2) Asuransi kecelakaan kerja untuk pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecelakaan.
- (4) Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari penyakit.
- (5) Asuransi hari tua untuk orang yang sudah pensiun.

c) Bantuan Sosial.

Bantuan sosial atau kerap disebut juga bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditunjukkan untuk membantu atau melindungi individu, keluarga, dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Bentuk-bentuk bantuan sosial berupa:

- (1) Transfer uang atau barang seperti bantuan langsung tunai, kupon, makanan atau pemberian kursi roda, tongkat dan komputer braille bagi penyandang cacat.
- (2) Bantuan Operasional sekolah atau program Keluarga Harapan (PKH).

(3) Program Raskin Dan minyak tanah bersubsidi serta penjualan sembako murah dimasa krisis.

d) Skema mikro dan berbasis komunitas

Perlindungan sosial mikro berbasis komunitas memberi perlindungan terhadap sekelompok orang. Tujuannya untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas.

e) Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang dimaksud disini adalah anak-anak penyandang cacat atau anak dengan kemampuan khusus (AKK) adalah sub kelompok atau bagian dari populasI ODKK (Orang Dengan Kemampuan Khusus), yang memiliki hak dan kemampuan khusus untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, rekreasi dan perlindungan. Program ini antara lain:

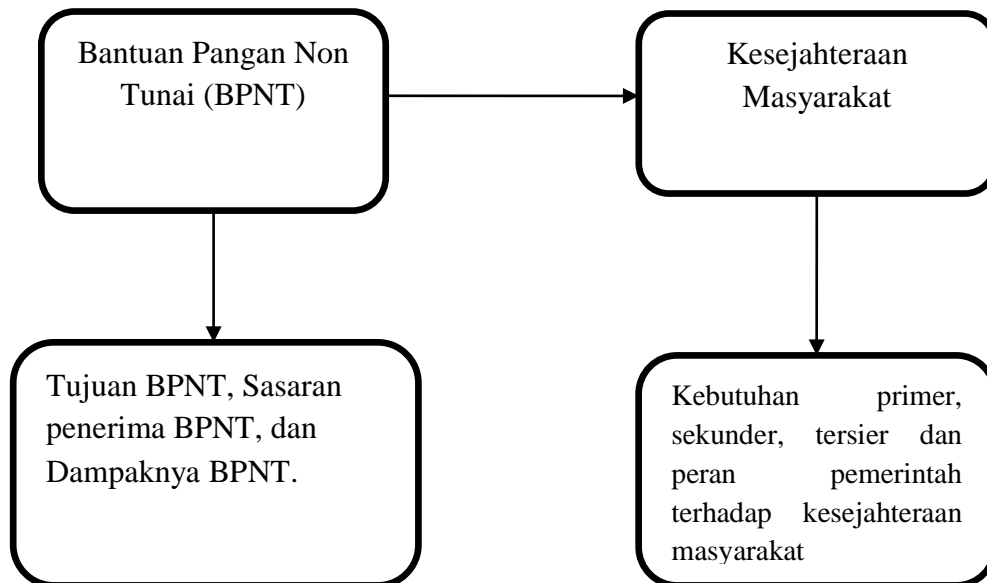
- (1) Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang, barang atau pelayanan rawatna bagi keluarga yang memiliki Anak dengan Kemampuan Khusus, pemberian bantuan makanan atau peralatan yang diperlukan anak dengan kemampuan khusus.
- (2) Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembag-lembaga pelayanan untuk memperkuat inklusifitas Anak dan Kemampuan Khusus, seperti menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak, dan diskriminasi serta eksploitasi terhadap Anak dengan Kemampuan Khusus.

Jika di implementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembanguana sosial dan ekonomi yang lebih luas, maka skema-skema perlindungan sosial tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>31</sup>

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir**



<sup>31</sup>Hardiawansyah, "Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makasaar, 2011), h. 26-28.

Berdasarkan kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa Beras, telur, maupun uang setiap bulan dengan menggunakan kartu seperti Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan dana bantuan sosial yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pokok sehinggah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektivitas dan efesiensi baik dalam keadaan fisik maupun ekonomi dan tepat, namun penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang berhak menerima tetapi tidak menerima bantuan begitupun demikian tidak berhak menerima tetapi menerima bantuan tersebut dan waktu penyalurannya masih belum berjalan dengan baik karena penyalurannya kadang dilaksanakan setiap bulan kadang juga dilaksanakan dua bulan sekali akan tetapi pada dua bulan sekali itu menerima bantuan secara sekaligus sama halnya menerima bantuan setiap bulannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan pendekatan penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Ditinjau dari tempat penelitian maka Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena meninjau langsung dalam mengambil data mengenai suatu tempat yang akan diteliti yaitu Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kab.Bone.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

#### **B. *Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini beralokasikan di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kab.Bone

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan mulai pengajuan judul, menyusun draf, sampai pengumpulan data. Penulisan ini dimulai dari bulan Juli 2019 sampai bulan juli 2020.

#### **C. *Data dan Sumber Data***

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau

keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi atau hanya pada hal yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber utama (sumber asli) dari objek/subjek penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone. Jadi, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat langsung oleh peneliti di lapangan. Sumber data primer inipenulis dapat memperoleh informasi-informasi dengan cara melakukan wawancara dengan petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masyarakat miskin yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone sebanyak 7 orang.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam arti lain data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data dapat digali melalui sumber data seperti jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut.

---

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

#### **D. *Subjek dan Objek Penelitian***

##### **1. Subjek penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masyarakat miskin yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone sebanyak 7 orang.

##### **2. Objek penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone.

#### **E. *Teknik Pengumpulan Data***

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan alat indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya.<sup>33</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi atau dengan mengadakan pengamatan di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone secara langsung untuk mengetahui secara pasti keadaannya.

---

<sup>33</sup>Nasution, *Metode Research* (Cet. III; Jakarta: Bumi aksara, 2000), h. 106.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Dalam cakupan yang lebih luas wawancara sesungguhnya adalah forum interaksi yang sangat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara *interviewer* dan *interviewee*. Sedangkan dalam konteks kualitatif wawancara adalah suatu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>34</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang terkait mengenai masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Adapun Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

**Tabel 3.1**

**Pedoman Wawancara**

NO.	Fokus	Dimensi
	Penelitian	
1.	Bantuan	a. Tujuan BPNT
	Pangan Non	b. Sasaran penerima BPNT
	Tunai	c. Dampak BPNT

<sup>34</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, h. 30-31.

---

(BPNT)

---

- a. Kebutuhan
    - 1) Primer
    - 2) Sekunder
    - 3) Tersier
  - 2. Kesejahteraan Masyarakat
    - b. Peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.<sup>35</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi dan peneliti menyediakan perlengkapan yang akan digunakan untuk mencatat dokumen atau fakta-fakta yang ada di Kantor Desa yang berkaitan dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai berupa buku-buku, Majalah, internet dan lain-lain. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan dari hasil observasi dan wawancara akan lebih akurat dan mendukung dengan adanya dokumentasi pada penelitian ini.

#### F. *Tehnik Analisis Data*

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Data kualitatif berbentuk metode deskriptif yaitu suatu

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Ed. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 241.

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>36</sup> Menurut Burhan Bungin menjelaskan bahwa penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu.<sup>37</sup> Analisis data adalah suatu cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yang mengantarkan peneliti untuk berpikir tentang data yang ada dan mengumpulkan data baru melalui pengembangan strategi. (Miles dan Huberman 1984) Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu proses yang terjadi dilapangan dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses yang berorientasi pada penelitian kualitatif yang berlangsung , dengan menggunakan cara seperti membuat ringkasan, mengkode data dan membuat catatan-catatan kecil. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data dan meringkas data yang didapatkan dilapangan sehingga dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan dapat diverifikasi.

#### 2. Penyajian data

---

<sup>36</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

<sup>37</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*(Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 153.

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun informasi-informasi sehingga dapat menarik kesimpulan dalam mengambil tindakan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian-penyajian data dengan menganalisis data yang valid diantaranya dalam bentuk naratif, grafik maupun dalam bentuk bagan sehingga dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan dapat diverifikasi.

### 3. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk merangkum data yang diperoleh di lapangan. Dimulai dari reduksi data sampai penyajian data sehingga dapat menarik kesimpulan atau verifikasi yang valid.<sup>38</sup> Pada penelitian ini peneliti menganalisis data-data yang muncul dan harus diuji kebenaran dan kekuatannya agar dapat menarik kesimpulan yang benar-benar valid dan perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>38</sup>Mile, M.B. Dan Huberman, A.M, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohend (Cet. 3; Jakarta: UI Press, 1992), hal. 32.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

###### a. Sejarah singkat Desa Jaling

Pada dahulu kala ada ”tikar jali emas” menancap disalah satu tempat di Dusun Watang Jaling, pada waktu itu kelihatan dari mata umum masyarakat setempat maka bersatulah orang ada ditempat itu untuk mencabut Jali Emas yang tercancang itu, namun yang terjadi Jali tersebut semakin ditarik keatas oleh orang banyak semakin turun kebawah sampai tenggelam atau habis, pada saat ditarik keatas (Jali Emas) orang-orang berkata “**Manya-manyai**” akhirnya tetap juga tenggelam dan setelah tenggelam muncul mata air akhirnya menjadi sumur kemudian diberi nama sumur **Lamanya**, dan itulah sebabnya diberi nama Desa Jaling karena adanya Jali Emas yang muncul di Dusun Watang Jaling. Kata Jali sama dengan Jaling, walaupun sekarang posisi sumur itu (LAMANYA) terdapat di Desa Awolagading karena Desa Jaling sudah dimekarkan menjadi dua desa’ sebelum dimekarkan desa Jaling tempat sumur itu adalah Dusun Watang Jaling.<sup>39</sup>

Sebelum Tahun 1966 Desa Jaling sudah menjalankan pemerintahannya dan pertama kali dipimpin Pabbicara Tare dan Nusu. Pada tahun 1966 itu pula digantikan oleh H. Made Aming yang merupakan

---

<sup>39</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 9.



penunjukan secara aklamasi sebagai kepala Desa di Jaling. Dan pada tahun itu juga diberhentikan sebagai kepala Desa dan digantikan oleh Peko Idris untuk menjabat pemerintahan sementara. Pada tahun 1966 – 1969 kepala Desa Jaling oleh Sakaria yang terpilih secara aklamasi kembali dan baru dilaksanakan pilkades langsung pada tahun 1969 ketika itu terpilih sebagai kepala Desa Jaling adalah Drs. Abd Majid dan masa pemerintahannya sampai tahun 1988 dan pada waktu masa pemerintahannya terjadi banjir bandang sebanyak dua kali yaitu tahun 1973 dan tahun 1987 di dusun Lapuse dan dusun Abbekkae.

Pada tahun 1988 masa jabatan Sakaria habis dan digantikan oleh A. Tantawi sebagai pejabat desa untuk menjalankan pemerintahan sementara. Pada tahun 1989 diakan pilkades lagi dan kepala Desa Jaling yang terpilih adalah Muh. Idris. masa pemerintahannya adalah 1989-2007 karena mencapai 2 periode dalam memerintah Desa Jaling. Pada tahun 2007-2008 Muh. Rusli ditunjuk sebagai pemerintah sementara sampai ada kepala desa yang terpilih kembali.

Tahun 2008 dilaksanakan Pilkades di Desa Jaling dan yang berhasil terpilih adalah A r d i, S.sos untuk Priode 2008-2014 dengan keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelompok petani yang dirasakan oleh semua masyarakat Desa Jaling sehingga para masyarakat meminta kembali Ardi,S.sos untuk mencalonkan kembali untuk Priode 2015-2021.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 10.

Pada Tahun 2014- 2015 Kepala Desa Jaling dijabat oleh Muhammad Rusli (Sekdes Jaling). Pada tanggal 14 Nopember 2015 dilaksanakan Pilkades Serentak se-Kabupaten Bone dan termasuk Desa Jaling, A r d i, S.sos. kembali terpilih untuk kedua kalinya Priode 2015-2021.

Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa yaitu:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) Sebelum tahun 1996      | : - Pabbicara Tare<br>- Pabbicara Nusu |
| 2) Tahun 1966              | : H. Made Aming                        |
| 3) Pejabat 1966            | : P. Idris                             |
| 4) 1966-1969               | : Sakaria                              |
| 5) 1969-1988               | : Drs. Abd. Majid                      |
| 6) 1988                    | : A. Tawanti                           |
| 7) 1989-2007               | Muhammad Idris                         |
| 8) Pejabat 2007-2008       | : Muhammad Rusli                       |
| 9) 2008-2014               | : Ardi, S.Sos.                         |
| 10) Pelaksanaan tugas 2015 | : Muhammad Rusli                       |
| 11) 2016-2012              | : Ardi, S.Sos. <sup>41</sup>           |

#### b. Lokasi Desa Jaling

Lokasi Desa Jaling berada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan luas wilayah  $\pm 6,44$  km<sup>2</sup>. dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matuju.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Cumpiga.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mappalo Ulaweng.

---

<sup>41</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 10.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lattekko/Awolagading.

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Jaling terletak antara 413LS - 504LS dan 11942 BT – 120BT, jarak antara Ibukota Desa dengan Ibu kota Kabupaten Bone sebesar 13 Km lewat darat, dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu 15 menit, Desa Jaling memiliki jarak dari ibukota kecamatan Awangpone  $\pm$  3 Km dengan jarak tempuh 5 menit, Desa Jaling memiliki jarak dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan  $\pm$  185 Km dengan jarak tempuh 4 Jam.

Desa Jaling terbagi dalam 4 Dusun dan 8 RT yaitu Dusun I Lapuse, Dusun II Abbekkae, Dusun III Lempu dan Dusun IV Awangpasareng .Ketinggian tanah wilayah Desa Jaling 24 m dari permukaan laut, dengan suhu rata – rata antara 30°C sampai dengan 32°C dengan curah hujan rata – rata 1,00 mm/tahun.<sup>42</sup>

Penduduk Desa Jaling Tahun 2016 (sumber data)  $\pm$ 2490 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1199 jiwa sedangkan perempuan 1291 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Jaling terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 673 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 6 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Jaling dapat dilihat pada tabel berikut ini :

---

<sup>42</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 11.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin**

Nama dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total Jiwa
		L	P	
Dusun I Lapuse	164	307	344	651
Dusun II Abbekkae	209	404	412	816
Dusun III Lempu	179	343	356	699
Dusun IV Awangpasareng	132	249	268	467
<b>Jumlah</b>	<b>684</b>	<b>1303</b>	<b>1380</b>	<b>2683</b>

Tingkat pertumbuhan penduduk tidak terlalu meningkat hanya saja tingkat perkawinan usia dini yang masih tinggi dimana rata-rata usia perempuan menikah diusia 17 – 25 tahun yang semestinya harus mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian angka kepadatan penduduk Desa Jaling. masih dapat ditekan, dan hal ini sudah terbukti dengan kurangnya jumlah anak dalam setiap rumah tangga dari tiap pasangan usia subur. Dimana setiap rumah tangga rata-rata punya anak 1- 3 saja, sehingga istilah banyak anak banyak rezki sudah tidak berlaku lagi, dengan adanya alat Kontrasepsi yaitu KB dan Kondom yang tersedia dipustu secara gratis sehingga dapat ditekan pertumbuhan anak.<sup>43</sup>

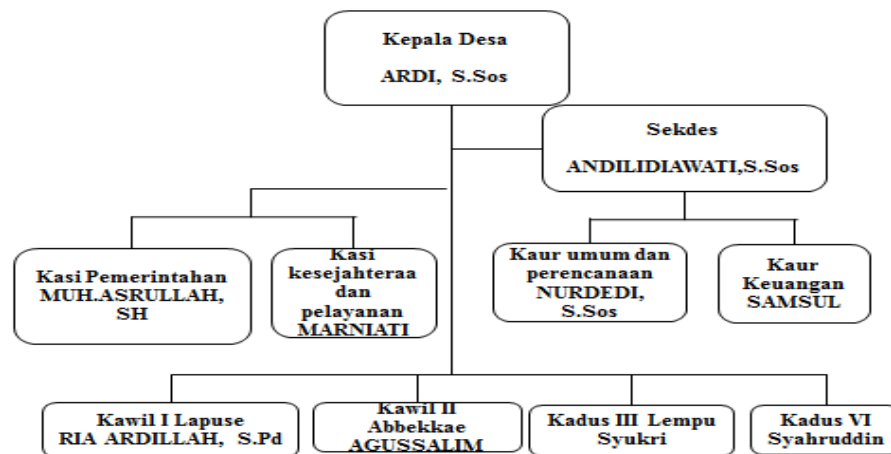
<sup>43</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 12.

### c. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Jaling berdasarkan Peraturan Desa Jaling Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Jaling adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**

#### **Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jaling**



Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di Desa. Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 29.

#### d. Visi dan Misi

##### 1) Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi merupakan harapan atau cita-cita yang kita ingin diwujudkan bersama masyarakat dan pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun kedepan. Visi juga berangkat dari potensi atau masalah yang ada dan itulah yang menjadi dasar dalam menyusun perencanaan untuk enam tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi desa 6 tahun kedepan maka yang dibutuhkan bukan orang banyak berceloteh tetapi yang harus kita bangun adalah komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya.<sup>45</sup>

#### **Rumusan Visi Desa Jaling**

**“Terwujudnya Desa Jaling menjadi desa yang sejahtera, sehat,dan mandiri, berbasisi pada sektor pertanian, perkebunan,perdagangan, UKM, kesehatan,sosial, pendidikan dan keamanan”**

- a) Sejahtera berarti : Bertekad Mensejahterakan rakyat Desa Jaling sesuai dengan Visi Kabupaten Bone.
- b) Sehat berarti : Menjadikan masyarakat yang Bebas dari berbagai gangguan kesehatan dengan cara menciptakan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

---

<sup>45</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 43.

c) Mandiri berarti : Mampu membangun Desa, dengan menggali potensi yang ada di Desa Dengan mengedepankan kebersamaan.

Berbasis pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, UKM, Kesehatan, Sosial, Pendidikan, dan Keamanan berarti:

- a) Bahwa Desa Jaling akan menjadi desa yang terdepan di beberapa bidang baik pada bidang SDM maupun pada bidang pertanian, perkebunan perdagangan, ukm, kesehatan social, pendidikan dan keamanan masyarakatnya.
- b) Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, ditunjang dengan perekonomian yang maju, mandiri, dan merata serta infrastruktur yang memadai.<sup>46</sup>

## 2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang ada di Desa Jaling yang akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan. Misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan dari visi desa. Adapun misi yang telah dirumuskan yaitu:

- a) Mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana publik yang mandiri untuk meningkatkan hasil pertanian, perdagangan dan perkebunan.
- b) Mendorong sektor usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- c) Mengembangkan kualitas SDM dan pemahaman masyarakat tentang pola tanam yang baik.

---

<sup>46</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 43.

- d) Mendorong masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai masalah kesehatan, sosial, pendidikan dan keamanan.<sup>47</sup>

## 2. Deskripsi Data Hasil Penelitian

- a. Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone berlangsung sejak tahun 2018 sudah berjalan sesuai dengan pelaksanaan pada umumnya yaitu penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada masyarakat miskin berupa beras dan telur yang pelaksanaannya dilakukan sebulan sekali atau tiga bulan sekali dengan jumlah yang diterima dari hasil akumulasi penerimaan sebulan sekali.

Berikut ini data penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 2**

**Jumlah Penerima BPNT**

<b>No.</b>	<b>Nama Dusun</b>	<b>Keluarga penerima manfaat (jumlah KK)</b>
<b>1.</b>	<b>Lapuse</b>	<b>32</b>
<b>2.</b>	<b>Abbekkae</b>	<b>61</b>
<b>3.</b>	<b>Lempu</b>	<b>47</b>
<b>4.</b>	<b>Awangpasareng</b>	<b>18</b>
<b>Jumlah</b>		<b>158 KK</b>

Sumber Data : *Data SDD dan Profil Desa Tahun 2016*

<sup>47</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h. 43.



Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terbanyak adalah di dusun Abbekkae yang berjumlah 66 KK penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT). Dengan adanya bantuan ini maka dapat mengurangi beban masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai berikut:

- 1) Menurut informan 1 yaitu petugas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjelaskan mengenai tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Dan mengenai ketetapan sasaran dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu ketetapan sasarannya sudah mencapai 90%.
- 2) Menurut informan 2 sebagai penerima Bantuan yang mengatakan bahwa beliau menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atas utusan dari pihak Desa yang meminta kesediaan untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai tanda masyarakat yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- 3) Menurut informan 3 sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa beliau mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai tanda anggota penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa mendapatkan pendataan untuk menjadi anggota

---

<sup>48</sup>Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*, h.16.

penerima. Untuk proses penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pelaksanaannya sebulan sekali namun terkadang tiga bulan dari hasil akumulasi penerimaan sebulan sekali.

- 4) Menurut informan 4 sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa beliau diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tanpa melakukan pendataan secara langsung mengenai kondisi yang terjadi.
- 5) Menurut informan 5 sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa beliau diminta untuk menyediakan beberapa persyaratan administrasi untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tanpa adanya pendataan secara langsung mengenai kondisi yang terjadi dimasyarakat.
- 6) Menurut informan 6 sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengatakan bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang harus disetorkan ke Kantor Camat Awangpone.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdiri dari ketersediaan syarat, proses penyaluran sampai dengan tujuan dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi yang

diperoleh dari masyarakat bahwa prosedur penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan.

b. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi atau keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandan, pangan dan papan agar dapat hidup layak. Adapun jenis-jenis kebutuhan yang harus terpenuhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

- 1) Menurut informan 1 mengatakan bahwa merasakan dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan pangannya yang merupakan agenda utama yang dilakukan oleh pemerintah.
- 2) Menurut informan 2 mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu mengurangi beban masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok.
- 3) Menurut informan 3 mengatakan bahwa biaya pengeluaran untuk kebutuhan primer sudah tidak menjadi tanggungan keluarga.

Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone mencapai 5,8% yang dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu sehingga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi sejahtera yang termasuk dalam kategori keluarga sejahtera 1 dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota keluarga pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone minimal makan 2 kali sehari.
- 2) Terpenuhinya Kebutuhan pakaian untuk setiap anggota keluarga pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone
- 3) Fasilitas tempat tinggal sudah layak huni.
- 4) Setiap anggota keluarga pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone menerima layanan kesehatan dengan baik.
- 5) Fasilitas pendidikan yang terjamin bagi setiap anggota keluarga pada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas bahwa dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan kepada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bagian ini akan diuraikan interpretasi pembahasan secara spesifik dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa prosedur penerimaan Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan. Untuk implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebaiknya dimulai dari tahap pendataan yang secara langsung dan transparan, persyaratan administrasi untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak hanya terbatas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) melainkan beberapa persyaratan administrasi lainnya yang lebih menunjang untuk memilih masyarakat sebagai anggota penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Uraian tersebut sejalan dengan Kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai masyarakat miskin diantaranya sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik, tidak sanggup membayar biaya kesehatan, dan sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, butuh bangunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000/bulan.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahda Sulukin Nisa tahun 2019 yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa implemtasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum dapat memenuhi indikator 6T (Tepat sasaran, tepat, kualitas, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi) secara keseluruhan namun pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat harga. Sehingga tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi belum terpenuhi.

## 2. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan kepada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder.

Penguraian hasil penelitian di atas yang menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan baik primer maupun sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang sangat penting, karena manusia harus memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah berjalan sudah berjalan sesuai dengan aturan pemerintah karena didalam proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengurangi beban kebutuhan primer maupun sekunder, akan tetapi tidak boleh juga dijadikan sebagai penjamin kebutuhan dalam keluarga karena pada dasarnya keluarga harus memenuhi kebutuhan primer setiap harinya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Ahda Sulukin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 81.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari uraian penjelasan pada pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone terdapat permasalahan pada prosedur penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum terpenuhi secara keseluruhan dikarenakan persyaratan administrasi masih terbatas.
2. Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer pada kebutuhan pangan yang berupa beras dan telur sehingga biaya pengeluaran untuk kebutuhan tersebut dapat dialihkan pada kebutuhan yang lain misalnya kebutuhan sandang, papan, bahkan sampai pada kebutuhan sekunder.

#### ***B. Implikasi***

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah harus melakukan pendataan ulang agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima untuk mengurangi beban kebutuhan hidupnya, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan adanya tinjauan ulang ke

lapangan dari pihak Desa agar penyaluran bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin dan diharapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tidak menerima bantuan lagi agar dialihkan kepada masyarakat yang membutuhkan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Dini, Anisa Rahma. “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- Dokumentasi kantor Desa, *RPJM Desa Jaling tahun 2016-2020*.
- Halimah, Nur “ pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam”, Skripsi, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Halimah, Nur. “Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Handani, Deni. Dkk. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka pemerataan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo”. *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Hardiawansyah. “Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*.
- Huberman, A.M, dan Mile, M.B. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohend. Cet. 3; Jakarta: UI Press, 1992.
- Mardiyanto, dan Rohana. “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”. *Demography Journal Of Sriwijaya*, vol.6. 2, Januari 2019.
- Maulidina, Silvia. “Analisis Korelasi Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan Bandung, 2018.
- Miranda Mashanafi, Astrid Thalia. “Peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mangondow terhadap kesejahteraan masyarakat”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Mukminatul, Hasimi. Diah. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Nasution. *Metode Research*. Cet. III; Jakarta: Bumi aksara, 2000.
- Nazilla, Riski Ulfa. “Efektifitas Pengalokasian Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Desa Genceu Komplek Kecamatan Banda Raya. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Nisa, Ahda Sulukin. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Pepi, Ayuni Zalita. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Elektronik Warung". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung 2019.
- Rachman, Benny. dkk. "Efektifitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)". *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 16. No. 1, Juni 2018.
- Ramadhan, Tondhi. "Efektifitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekabaru". *Jom fisip*, vol.5, Edisi II Juli-Desember 2018.
- Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara". *Jurnal Geografi*, Vol 9 No.1, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Ed. 20 Bandung: Alfabeta, 2014.
- Triana, Ayu. "Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi organik dan anorgani". Skripsi, fakultas pertanian, Universitas lampung, Bandar Lampung, 2019.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Permohonan Izin penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**  
Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

---

Nomor : B-0638/In.33/TL.01/3/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bone  
Di-  
Watampone

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : ADRIANA  
Tempat / Tanggal Lahir : KAB. BONE, 1998-07-23  
NIM : 01163001  
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :  
**"ANALISIS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT DESA JALING KEC. AWANGPONE KAB. BONE"**

Pembimbing : 1. Dr. ANDI RUSLAN, SE., M.Si.  
2. Rina Novianty, S.Pd., M.Pd  
Waktu Penelitian : 09-03-2020 S/D 09-05-2020  
Tempat Penelitian : DESA JALING KEC. AWANGPONE KAB. BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 05 Maret 2020

  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  
**Dr. NURSYIRWAN, S.AG., M.PD.**  
NIM: 017308261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi EKONOMI SYARIAH IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

**Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

---

**IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 070/12.242/III/IP/DPMP/TSP/2020

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ADRIANA**  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01163001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Jaling Desa Jaling Kec. Awangpone  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ ANALISIS PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Desa Jaling Kec. Awangpone)”**

Lamanya Penelitian : 05 Maret 2020 s/d 05 Mei 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 05 Maret 2020

**KEPALA,**



**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Awangpone Kab. Bone di LappoAse.
4. Kepala Desa Jaling Kec. Awangpone di Jaling.
5. Arsip.

**Lampiran 3: Pedoman Wawancara**

No	Daftar pertanyaan
1.	Sejak kapan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada desa ini?
2.	Apa tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
3.	Jenis-jenis apa saja program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan pada desa ini?
4.	Siapa saja yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai?
5.	Apakah dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone?
6.	Bagaimana proses pelaksanaan pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
7.	Apakah penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada desa ini sudah tepat sasaran?
8.	Berapa jumlah Kartu Keluarga (KK) yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai pada Desa Jaling?
9.	Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
10.	Apakah dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini mampu memenuhi kebutuhan perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone?
11.	Bagaimana peran pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## Lampiran 4: Hasil Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan
1.	<p><b>Sejak kapan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada desa ini?</b></p> <p>Bantuan pangan non tunai (BPNT) pada desa ini dijalankan pada tahun 2018.</p>
2.	<p><b>Apa tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?</b></p> <p>Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.</p>
3.	<p><b>Jenis-jenis apa saja program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan pada desa ini?</b></p> <p>Jenis program Bantuan Yang disalurkan kepada masyarakat pada desa ini yaitu berupa beras dan telur</p>
4.	<p><b>Siapa saja yang berhak menerima bantuan pangan non tunai (BPNT)?</b></p> <p>Yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai yaitu masyarakat miskin karena pemerintah menyalurkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.</p>
5.	<p><b>Apakah dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jaling Kec. Awangpone Kab. Bone?</b></p> <p>Dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan tetapi tidak dapat juga dijadikan sebagai penjamin kebutuhan pokok untuk setiap harinya.</p>
6.	<p><b>Bagaimana proses pelaksanaan pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?</b></p> <p>Proses pelaksanaanya masyarakat yang datang ke E-Warung untuk membelanjakan bantuan yang diterima.</p>
7.	<p><b>Apakah penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Desa ini sudah tepat sasaran?</b></p> <p>Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa ini 90% ketepatan sarannya.</p>
8.	<p><b>Berapa jumlah Kartu Keluarga (KK) yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Jaling?</b></p> <p>Jumlah yang menerima bantuan sebanyak 158 KK.</p>
9.	<p><b>Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?</b></p>

	Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan dapat mengurangi kemiskinan yang merupakan agenda utama yang dilakukan oleh pemerintah.
	<b>Bagaimana peran pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?</b>
<b>10.</b>	Peran pemerintah desa dalam menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik karena penyaluran bantuan tersebut belum tepat sasaran dan tepat waktu.



**Lampiran 5: Dokumentasi**







## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : ADRIANA
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Lapuse, 23 Juli 1998
4. Alamat : Lapuse Desa Jaling
5. Nama orang tua  
Ayah : Bakri  
Ibu : Suarni
6. Pekerjaan orang tua  
Ayah : Petani  
Ibu : IRT
7. Anak ke/ jumlah bersaudara : 1/1
8. No. Hp : 0822929799930
9. E-mail : -



### B. Pendidikan

1. SDN 50 Jaling (2004-2010)
2. SMPN 2 Awangpone (2010-2013)
3. SMAN 1 Tellusiattinge (2013-2016)
4. IAIN BONE (2016-2020)